

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan peneliti untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian dan memudahkan dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk menyusun sebuah penelitian dari segi teori dan konsep.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul/Jurnal	Objek	Hasil
1	Nawangsa ari &Putra (2016)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Dalam Menurunkan Tingkat Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam "Kharisma Mitra Karya"	Koperasi Simpan Pinjam Kharisma a Mitra Karya	Sistem Pengendalian intern Koperasi Simpan Pinjam Mitra Karya belum dilakukan secara baik atau efektif karena tugas account officer belum ditetapkan secara jelas karena masih merangkap sebagai petugas survei.
2	Sasmitha (2018),	Prosedur Dan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mulia Desa Bondalem	Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mulia Desa Bondalem	Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mulia Desa Bondalem dalam pemberian kredit tersebut sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya sistem pengendalian internal menurut COSO yang meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

- | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|--|
| 3 | Sari & Ismawati (2019) | Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit (Studi Kasus pada Koperasi Wanita Aisyiyah Ngadiluwih) | Koperasi Wanita Aisyiyah Ngadiluwih | sistem pengendalian intern pada sistem pemberian kredit di Koperasi Wanita Aisyiyah Ngadiluwih masih belum sepenuhnya sesuai dengan teori COSO, hal ini bisa diketahui dari empat aktivitas yang belum dilakukan, yaitu pelaksana kredit belum terpisah dari pembahas kredit, pelaksanaan kredit belum terpisah dari penyidikan dan analisa kredit, bagian administrasi belum terpisah dari kasir dan koordinator. |
| 4 | Tapatab <i>et. al.</i> , (2021) | Analisis Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Pada Koperasi Kredit Swasti Sari Kota Kupang. | Koperasi Kredit Swasti Sari Kota Kupang | Pengendalian internal sudah dijalankan dalam membantu menunjang efektivitas pemberian kredit, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya lima komponen sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, pengawasan, informasi dan komunikasi. Namun dalam pengendalian tersebut terjadi masalah pada komponen lingkungan pengendalian |
| 5 | Megaputri & Astawa (2023) | Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit di Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti | Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti | Sistem pengendalian yang dilakukan oleh KSP Praja mukti belum sesuai dengan prespektif COSO, dimana lingkungan pengendalian bagian Integritas dan nilai etika pada koperasi hanya dilakukan secara lisan belum menetapkan standar perilaku bagi pengurus koperasi, selain itu penilaian risiko pada permohonan kredit, koperasi belum optimal dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko |

Banyak penelitian akademisi tentang koperasi simpan pinjam yang berbeda menekankan kerangka pengendalian kredit internal di dalam lingkungan koperasi, penelitian pertama yang dilakukan oleh Nawangsari & Putra (2016), yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Dalam Menurunkan Tingkat Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam “Kharisma Mitra Karya” yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian intern Koperasi Simpan Pinjam Mitra Karya belum dilakukan secara baik atau efektif karena tugas account officer belum ditetapkan secara jelas karena masih merangkap sebagai petugas survei. Pengawasan dan perlindungan aset juga masih kurang, karena pengecekan pada setiap bagian utamanya account officer masih jarang dilakukan, dan pengawasan terhadap anggota masih belum dilaksanakan secara efektif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sasmita (2018), dengan judul Prosedur Dan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mulia Desa Bondalem prosedur pemberian kredit sudah baik dan memadai hal ini dapat dilihat dari prosedur pemberian kredit, bagian yang terkait dalam pemberian kredit, dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit, catatan akuntansi yang digunakan dalam pemberian kredit yang dapat di gambarkan bagan Aliran Prosedur Pemberian Kredit (flowchat). Selanjutnya Pada Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mulia Desa Bondalem dalam pemberian kredit tersebut sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya sistem pengendalian internal menurut COSO yang meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Kemudian penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Sari & Ismawati (2019), dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit (Studi Kasus pada Koperasi Wanita Aisyiyah Ngadiluwih) yang hasilnya

sistem pengendalian intern pada sistem pemberian kredit di Koperasi Wanita Aisyiyah Ngadiluwih masih belum sepenuhnya sesuai dengan teori COSO, hal ini bisa diketahui dari empat aktivitas yang belum dilakukan, yaitu pelaksana kredit belum terpisah dari pembahas kredit, pelaksanaan kredit belum terpisah dari penyidikan dan analisa kredit, bagian administrasi belum terpisah dari kasir dan koordinator, bagian kredit dan kasir belum memiliki otorisasi sandi yang berbeda untuk masing-masing karyawan dalam mengakses data komputer.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Tapatab *et al.*, (2021), dengan judul Analisis Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Pada Koperasi Kredit Swasti Sari Kota Kupang yang memperoleh hasil bahwa pada Koperasi Kredit Swasti Sari Pengendalian internal sudah dijalankan dalam membantu menunjang efektivitas pemberian kredit, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya lima komponen sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, pengawasan, informasi dan komunikasi. Namun dalam pengendalian tersebut terjadi masalah pada komponen lingkungan pengendalian yaitu penempatan karyawan tidak sesuai dengan basic pendidikannya dan kurangnya sumber daya manusia. Komponen aktivitas pengendalian terdapat masalah dalam perangkapan tugas pada pelaksanaan kredit. Pada komponen pengawasan terjadi kurangnya pengawasan dilapangan.

Terakhir, penelitian kelima yang dilakukan oleh Megaputri & Astawa (2023), dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit di Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti dengan hasil Sistem pengendalian yang dilakukan belum sesuai dengan prespektif COSO, dimana lingkungan pengendalian bagian Integritas dan nilai etika pada koperasi hanya dilakukan secara lisan belum menetapkan standar perilaku bagi pengurus koperasi, selain itu penilaian risiko pada permohonan kredit, koperasi belum optimal dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko dan belum membuat Standar Operasional Prosedur

(SOP) tentang pemberian kredit.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat kesamaan permasalahan yang dihadapi oleh beberapa koperasi yaitu pada pembagian tugas dan wewenang dimana terdapat account officer masih merangkap sebagai petugas survei, pelaksana kredit belum terpisah dari pembahas kredit, pelaksanaan kredit belum terpisah dari penyidikan dan analisa kredit, bagian administrasi belum terpisah dari kasir dan koordinator, bagian kredit dan kasir belum memiliki otorisasi sandi yang berbeda untuk masing-masing karyawan dalam mengakses data komputer (Nawangsari & Putra, 2016 ; Sari & Ismawati, 2019 ; Tapatab *et al.*, 2021). Selain permasalahan pada pembagian tugas terjadi juga masalah dimana pengawasan dan perlindungan aset utamanya account officer masih jarang dilakukan, dan pengawasan terhadap anggota masih belum dilaksanakan secara efektif dan penilaian risiko pada permohonan kredit, koperasi belum optimal dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko serta Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pemberian kredit belum dibuat (Megaputri & Astawa, 2023 ; Nawangsari & Putra, 2016).

B. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Pengendalian Intern

a. Definisi Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Menurut Mulyadi (2013), sistem pengendalian internal terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Astuti et al., 2022).

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses dimana manajemen mendesain dan memberikan keyakinan yang cukup atas informasi keuangan dan operasional yang andal, kepatuhan terhadap peraturan dan keputusan yang berlaku, operasional yang efisien, pencapaian atas sasaran dan operasional

yang telah ditetapkan, perlindungan aset, serta nilai integritas dan etika yang tinggi (Rangian et al., 2021).

Pengendalian internal mencakup kebijakan dan proses yang diterapkan dalam menjalankan operasi bisnis untuk menghasilkan data keuangan yang dapat diandalkan dan menjamin kepatuhan terhadap kerangka hukum dan peraturan yang relevan (Satriadi & Dewi, 2020).

Menurut Sarifah (2018), definisi pengendalian internal adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan anggota staf lainnya untuk memastikan bahwa tiga kelompok memadai dalam pencapaian berupa keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan hukum, serta efektivitas dan efisiensi operasional dan dipenuhi dengan keyakinan yang cukup.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal meliputi kebijakan serta proses yang diterapkan untuk menjalankan bisnis guna untuk memperoleh data keuangan yang dapat diandalkan dan menjamin kepatuhan terhadap kerangka hukum dan peraturan yang relevan (Satriadi & Dewi, 2020). Tujuan sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2013), dalam penelitian (Astuti et al., 2022) :

1) Menjaga Kekayaan Perusahaan

Jika sistem pengendalian intern dilakukan dan berjalan dengan sebagaimana mestinya maka akan meminimalisir terjadinya kecurangan, pemborosan, tidak efisien, serta peryalahgunaan aktivitas perusahaan.

2) Mengecek Ketelitian dan Keandalan Data Akuntansi

Manajemen menggunakan keandalan data dan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketepatan dan kepercayaan data akuntansi.

3) Mendorong Efisiensi

Kebijakan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dengan

mendukung setiap pengorbanan yang telah dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal.

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian intern dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dan memberikan keyakinan bahwa kebijakan dan prosedur yang dibuat perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan

c. Unsur Pengendalian Intern

1) Menurut Prespektif COSO

Dalam penelitian Megaputri & Astawa (2023), terdapat beberapa unsur-unsur pengendalian intern menurut prespektif COSO :

a) Lingkungan Pengendalian (*Control Enviroment*)

Dalam penelitian Megaputri & Astawa (2023), terdapat beberapa faktor yang membentuk lingkungan pengendalian di sebuah organisasi :

➤ **Integritas dan nilai etika.**

Megaputri & Astawa (2023), menjelaskan bahwa dalam situasi yang sulit, orang yang dapat dipercaya akan bertindak dengan sangat percaya diri berdasarkan kualitas, prinsip yang tersirat, dan cara berhubungan.

Romney & Steinbart (2015), mengemukakan perusahaan mendukung integritas dengan :

- Mengajarkan dan meminta karyawan aktif, dan menekankan bahwa laporan yang jujur lebih baik daripada laporan yang tidak jujur.
- Menghindari harapan yang tidak realistis, seperti memberikan bonus yang berlebihan kepada karyawan.
- Membuat kode etik yang jelas yang menjelaskan perilaku yang tidak jujur.

- Mewajibkan karyawan untuk lapor ketika terdapat tindakan yang tidak jujur.
- Membuat suatu komitmen terhadap kompetensi.

➤ Komitmen terhadap kompetensi.

Manajemen mempertimbangkan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan serta kombinasi pengetahuan, pelatihan, dan pengalaman yang diperlukan untuk menumbuhkan kompetensi (Megaputri & Astawa, 2023).

Romney & Steinbart (2015), menjelaskan beberapa kebijakan dan prosedur Sumber daya manusia yang perlu diperhatikan :

- Perekrutan, karyawan ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, pencapaian, kejujuran/integritas, serta persyaratan yang sesuai.
- Mengkompensasi, mengevaluasi, dan mempromosikan.
- Pelatihan, melakukan pelatihan karyawan dengan melakukan diskusi resmi maupun tidak resmi dll.
- Untuk menangani karyawan yang tidak puas, organisasi dapat membangun pusat keluhan dan memberikan konseling kepada karyawan.

➤ Dewan direksi dan komite audit

Komite audit yang terdiri dari direksi dari luar perusahaan dapat sangat membantu mencapai tujuan pelaporan keuangan perusahaan karena memungkinkan auditor eksternal menjadi lebih independen dan melakukan pemeriksaan kekeliruan laporan keuangan (Megaputri & Astawa, 2023).

Menurut Romney & Steinbart (2015), Komite audit bertanggung jawab atas pelaporan keuangan, pematuhan terhadap undang-undang, pengawasan internal, dan

pengangkatan dan pengawasan auditor internal dan eksternal, yang melaporkan kebijakan dan praktik akuntansi secara keseluruhan.

➤ Penetapan wewenang dan tanggung jawab

Wewenang dan tanggung jawab memberikan penjelasan tentang bagaimana dan kepada siapa wewenang dan tanggung jawab atas semua aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. Ini juga harus memungkinkan setiap orang untuk memahami bagaimana tindakannya berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi dan apa yang mereka lakukan (Megaputri & Astawa, 2023).

Romney & Steinbart (2015), menjelaskan bahwa wewenang dan tanggung jawab ditetapkan dan dikomunikasikan menggunakan deskripsi pekerjaan formal, pelatihan pegawai, jadwal pengoperasian, anggaran, kode etik dan kebijakan prosedur tertulis.

➤ Struktur organisasi

Megaputri & Astawa (2023), menjelaskan bahwa dengan menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan operasi, struktur organisasi membantu suatu perusahaan memenuhi tujuan.

Menurut Romney & Steinbart (2015), ada beberapa indikator penting dari struktur organisasi :

- Sentralisasi/desentralisasi wewenang.
- Hubungan pengarahan atau matriks pelaporan.
- Organisasi yang bergantung pada industri, produk, lokasi, dan jaringan pemasaran.
- Bagaimana distribusi tanggung jawab berdampak pada ketentuan organisasi.
- Organisasi dan garis wewenang akuntansi, audit, dan

fungsi sistem.

- Ukuran serta jenis aktivitas perusahaan.

b) Penaksiran Resiko (*Risk Assesment*)

Megaputri & Astawa (2023), menjelaskan penaksiran resiko terdiri mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia merupakan penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan.

Untuk membantu manajemen dalam penaksiran resiko, berikut ini merupakan cara untuk mengidentifikasi penilaian resiko (Romney & Steinbart, 2015):

- Memperkirakan kemungkinan dan konsekuensi karena terdapat kejadian dengan resiko yang lebih tinggi dan kemungkinan besar bahwa mereka akan terjadi.
- Menentukan pengendalian yang akan melindungi perusahaan dari semua kemungkinan
- Membuat perkiraan biaya dan keuntungan bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi lagi.
- Menentukan seberapa efektif biaya dan keuntungan, manajemen harus memastikan bahwa pengendalian merupakan biaya yang menguntungkan.
- Menggunakan pengendalian biaya efektif untuk mengurangi resiko: resiko harus diterima, dibagi, atau dihindari, dan resiko dapat diterima jika masih berada dalam batas toleransi resiko perusahaan.

c) Informasi dan Komunikasi (*Information and communication*)

Fungsi dari informasi dan komunikasi dalam unsur ini adalah digunakan untuk mengenali, mengelompokkan,

memeriksa, mencatat, dan melaporkan pertukaran suatu masalah, serta bertanggung jawab atas sumber daya dan kewajiban perusahaan tersebut (Megaputri & Astawa, 2023). Kerangka Informasi dan Komunikasi menjelaskan bahwa ada tiga prinsip yang digunakan untuk memproses informasi dan komunikasi (Romney & Steinbart, 2015):

- Mencari dan membuat data berkualitas tinggi yang relevan untuk mendukung pengendalian internal
- Mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung elemen lain dari pengendalian internal.
- Mengkomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal

d) Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal (Megaputri & Astawa, 2023).

Romney & Steinbart (2015), menjelaskan prosedur pengendalian dalam kategori sebagai berikut :

- Otorisasi transaksi serta aktivitas yang layak.
- Pemisahan tugas.
- Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi.
- Mengubah pengendalian manajemen.
- Mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan.
- Pengamanan aset, catatan, dan data.
- Pengecekan kinerja yang independen.

e) Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan merupakan sebuah pembentukan dan pemeliharaan pengendalian internal merupakan tugas

utama manajerial. Manajemen mengawasi pengendalian untuk memastikan pengendalian tersebut berfungsi sebagaimana mestinya dan disesuaikan dengan tepat ketika keadaan berubah (Megaputri & Astawa, 2023). Berikut ini merupakan beberapa metode yang paling utama yang terdapat pada pemantauan kinerja (Romney & Steinbart, 2015) :

- Melakukan evaluasi pengendalian internal.
- Mengimplementasikan pengawasan yang efektif.
- Menggunakan sistem akuntansi pertanggung jawaban.
- Mengawasi aktivitas sistem.
- Menjalankan audit berkala.

2) Menurut Prespektif Mulyadi

Menurut Mulyadi (2016), unsur-unsur pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
 - Fungsi operasi dan penyimpanan harus dipisahkan dari fungsi akuntansi.
 - Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan seluruh tahapan akuntansi.
- b) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap harta, hutang, penghasilan, dan biaya. Jadi setiap transaksi dalam organisasi hanya akan terjadi atas dasar otorisasi dari manajer atau ketua yang memiliki hak untuk menyetujui transaksi tersebut.
- c) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas serta fungsi tiap unit dan organisasi. Berikut ini merupakan cara umum yang dilakukan oleh perusahaan agar tercipta praktik yang sehat (Mulyadi, 2016):

- Formulir bernomor urut tercetak yang harus bisa dipertanggung jawabkan.
 - pemeriksaan mendadak tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak yang akan diperiksa.
 - Transaksi tidak boleh dilakukan mulai awal hingga akhir oleh satu orang tanpa adanya campur tangan dari orang lain.
 - Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin.
 - Keharusan cuti bagi karyawan yang berhak.
 - Pencocokan aset aset dengan catatan.
 - Pembentukan unit organisasi untuk mengecek efektifitas unsur pengendalian.
- d) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten maka perusahaan dapat melakukan hal berikut (Mulyadi, 2016) :
- Menyeleksi karyawan sesuai dengan syarat pekerjaanya.
 - Pendidikan karyawan harus dikembangkan selama masih menjadi karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

3) **Prosedur Umum Perkreditan Koperasi**

Menurut Kasmir (2014), dalam penelitian Semadi & Purnamawati (2022), berikut ini merupakan prosedur pemberian kredit secara umum:

- a) Pengajuan Berkas, dimana calon kreditur menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam pengajuan kemudian dilampiri dengan berkas lain yang di butuhkan.
- b) Pengecekan berkas calon kreditur, tujuannya adalah guna untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkapsesuai dengan persyaratan yang dibuthkan. Jika tidak sesuai pihak debitur akan meminta kreditur untuk melengkapi terlebih dahulu sesuai batas waktu yang telah

ditentukan.

- c) Setelah berkas-berkas lengkap maka akan dilakukan wawancara penyelidikan yang dilakukan oleh pihak debitur untuk meyakinkan bahwa berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap.
- d) Survey (On the spot), merupakan suatu kegiatan dimana bagian pemeriksa lapangan (surveyor) meninjau berbagai objek.
- e) Keputusan kredit merupakan bagian untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau tidak.
- f) Penandatanganan perjanjian kredit untuk mengikat jaminan antara kreditur dan debitur.
- g) Terakhir adalah realisasi kredit dimana dana akan diberikan kepada kreditur.

2. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, disebutkan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi adalah suatu badan usaha yang dipimpin secara demokratis yang terdiri dari perkumpulan orang yang bersifat sukarela dengan tujuan ekonomi yang telah disepakati oleh anggotanya dan organisasinya serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan asas kekeluargaan (Satriadi & Dewi, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, koperasi simpan pinjam adalah yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu satunya usaha. Koperasi simpan pinjam, juga

dikenal sebagai koperasi kredit, adalah bentuk koperasi yang berdiri sendiri di mana para anggotanya adalah individu atau entitas yang bergabung dalam koperasi.

3. Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit dalam bahasa latin "*credere*" yang artinya percaya, dimana debitur percaya kepada kreditur bahwa kredit yang disalurkan berupa uang atau barang akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu pengembalian atau pembayaran angsuran sesuai dengan keputusan yang telah disepakati bersama (Nawang Sari & Putra, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibandingkan dengan uang, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan bunga.

b. Prinsip-prinsip umum perkreditan

Dalam penelitian Astuti *et al.*, (2022), terdapat beberapa kriteria penilaian yang harus dilakukan pihak debitur untuk memperoleh kredit salah satunya adalah menggunakan analisis 5C yaitu sebagai berikut :

- 1) *Character* (Karakter), bertujuan untuk menanamkan kepercayaan pada karakter atau sifat orang yang akan dikreditkan.
- 2) *Capacity* (Kapasitas), untuk menilai kemampuan kreditur dalam bidang bisnis yang berkaitan dengan pendidikannya, kemampuan mengelola bisnis juga diukur dengan pemahaman tentang peraturan pemerintah.
- 3) *Capital* (Modal), mengetahui apakah penggunaan modal efektif,

laporan keuangan (neraca dan laba rugi) diperiksa dengan melihat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan metrik lainnya.

- 4) *Collateral* (Jaminan), Jaminan harus melebihi jumlah kredit dan juga harus diperiksa untuk memastikan bahwa, jika terjadi suatu masalah, jaminan dapat digunakan segera.
- 5) *Condition* (Kondisi), melalui kredit hendaknya kondisi ekonomi dan politik sekarang maupun dimasa akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan

